



## **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PRIORITAS PROGRAM PADAT KARYA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI**

Chandra Julihandono Sj  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Surabaya  
julihandono@kemenkeu.go.id

Alamat Korespondensi: julihandono@kemenkeu.go.id

### **ABSTRACT**

*The condition of the national economy which has not yet recovered due to the Covid-19 pandemic has resulted in the unemployment rate in Indonesia being still relatively high. This research aims to analyze the effectiveness and efficiency priority spending for labor intensive work program during the Covid-19 pandemic as part of The National Economic Recovery (PEN) program to reduce the number unemployment. The indicators used in this study are the Open Unemployment Rate (TPT) and the government spending for the labor intensive priority program during the Covid-19 pandemic. The research method in this paper uses descriptive qualitative approach with literature study through collecting information from various sources. The results of the study indicate the labor intensive work program was very effective however less efficient in reducing the number unemployment in Indonesia. This is because of the labor-intensive program has absorbed a number of workers according to the planned target by spending a large government budget in several areas affected by the Covid-19 pandemic, although there are still some obstacles experienced.*

*Keywords: labor intensive, unemployment, PEN, Covid pandemic*

### **ABSTRAK**

Kondisi perekonomian nasional yang masih belum pulih akibat pandemi Covid-19 telah mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya pada masa pandemi Covid-19 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi angka pengangguran. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan belanja Pemerintah untuk program prioritas padat karya selama pandemi Covid-19. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan program padat karya sangat efektif namun kurang efisien dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan program padat karya telah menyerap sejumlah tenaga kerja sesuai target yang telah direncanakan dengan menghabiskan anggaran belanja pemerintah yang besar pada beberapa daerah yang terdampak pandemi Covid-19 lebih dari 90% alokasi pagu anggaran belanja prioritas program padat karya, namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami.

Kata Kunci: padat karya, pengangguran, PEN, pandemi covid

KLASIFIKASI JEL:  
H30, H53

### **CARA MENGUTIP:**

Julihandono Sj, C. (2023). Efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 51-62.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tahun 2022 adalah tahun ketiga berlangsungnya pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) di Indonesia. Sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 9 Maret 2020, dunia seolah mengalami berbagai penyesuaian dan dampak akibat pandemi tersebut. Tidak hanya dampak kesehatan dimana jutaan orang telah terinfeksi, namun juga dampak ekonomi dan sosial juga turut menjadi perhatian dunia akibat pandemi, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pandemi Covid-19 telah turut menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak lanjutan dari adanya pembatasan pergerakan masyarakat. Pembatasan-pembatasan oleh Pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditujukan untuk menekan penyebaran penyakit, justru turut memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah perlu segera menyusun dan melaksanakan langkah-langkah yang tegas dan tepat tidak hanya perlindungan dan pemulihan pada sisi kesehatan, namun juga pada sisi ekonomi, terutama terhadap pemulihan dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Pemerintah telah menyusun pedoman dan regulasi sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak pandemi, seperti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh kebijakan dalam Perpu tersebut sudah didasarkan pada proses asesmen dan data terkini mengenai dampak dan ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan bangsa (Kementerian Keuangan, 2020). Perpu tersebut kemudian telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak baik dari aspek kehidupan sosial dan perekonomian.

Berdasarkan berita resmi statistik tahun 2020, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2020 hanya tumbuh pada angka 2,97% (*y-on-y*) atau

### PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Belanja Prioritas Pemerintah melalui program padat karya yang dilaksanakan beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sangat efektif namun kurang efisien dalam mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi.
- Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan program padat karya tersebut baik di masa pandemi maupun masa endemi dengan memperluas cakupan wilayah kerja, besaran anggaran, besaran target penyerapan, dan jenis program yang menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga tetap efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di seluruh wilayah Indonesia.

terkontraksi sebanyak 2,41% (*q-to-q*) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan jika dilihat pada Triwulan II 2020, ekonomi Indonesia turun sebesar 5,32% (*y-on-y*) atau 4,19% (*q-to-q*) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya pada Triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali terkontraksi, namun menunjukkan angka yang sedikit lebih baik yaitu sebesar 3,49% (*y-on-y*) atau naik sebanyak 5,05% (*q-to-q*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kemudian pada Triwulan IV 2020 kembali terjadi perbaikan pada angka 2,19% (*y-on-y*) atau terkontraksi sebesar 0,42% (*q-to-q*) terhadap triwulan sebelumnya (Badan Pusat Statistik [BPS], 2020).

Sementara itu, berdasarkan berita resmi statistik tahun 2021 ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2021 menunjukkan perbaikan yang signifikan sebesar 7,07% (*y-on-y*) atau tumbuh 3,31% (*q-to-q*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (BPS, 2021). Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia akan naik sebesar 4,5% pada Triwulan III 2021, sehingga secara kumulatif ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 4% (*y-on-y*) pada tahun 2021 (Kementerian Keuangan, 2021).

Di sisi lain, menurunnya kegiatan ekonomi masyarakat dan pengusaha atau lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan baru, banyaknya pegawai/karyawan yang diberhentikan sementara atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dan kurangnya penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Pengangguran ditimbulkan oleh jumlah lowongan pekerjaan yang ada lebih sedikit dibandingkan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah sebanyak 6,26% atau turun sebesar 0,81% dibandingkan TPT bulan Agustus 2020, dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 berjumlah 139,81 juta orang atau naik 1,59 juta orang dibandingkan pada Agustus 2020. Sementara itu, data TPT per Agustus 2021 adalah sebanyak 6,49% atau turun sebesar 0,58% dibandingkan per Agustus 2020 sebesar 7,07%, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 berjumlah 140,15 juta orang atau naik 1,93 juta orang bila dibandingkan pada Agustus 2020 (BPS, 2021a). Jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat secara tidak normal seiring berlangsungnya pandemi Covid-19 dengan banyaknya karyawan sektor formal dan informal yang terkena PHK dan sementara dirumahkan (Krisnandika et al., 2021). Covid-19 juga membuat tingkat usaha ekonomi turun yang menyebabkan banyak PHK dan tingkat pengangguran terbuka semakin meningkat sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, seperti memperbanyak program padat karya tunai dan padat karya produktif (Rizal & Mukaromah, 2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja prioritas program padat karya pada beberapa kementerian negara/lembaga (K/L) dalam rangka menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran yang semakin tinggi, terutama di wilayah yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun jumlah pagu atau anggaran belanja prioritas program padat karya di tahun 2020 adalah sekitar Rp21,68 triliun (target pekerja sebesar 2.623.550 orang) dan tahun 2021 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebesar Rp35,46 triliun yang terbagi ke beberapa kementerian dengan target *output* penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.987.886 orang (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021).

Berpijak pada kondisi perekonomian nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran sebagaimana riset terdahulu di atas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fokus penelitian ini diarahkan pada belanja prioritas program padat karya terhadap angka pengangguran di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan data belanja prioritas program padat karya pada K/L dan TPT sebagai sumber utama.

Yuniastari & Wiyati (2015) menyatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan (rasio) antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks belanja pemerintah berupa program padat karya, ukuran efektivitas ini

dapat dilihat dari dampak pelaksanaan belanja prioritas program padat karya terhadap penurunan tingkat pengangguran di wilayah-wilayah yang sangat terdampak pandemi Covid-19 sesuai target *output* penyerapan tenaga kerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi didefinisikan sebagai rasio antara masukan dan keluaran (rasio *output* per unit *input*). Suatu organisasi dianggap efisien jika dapat memperoleh keluaran tertentu berdasarkan masukan seminimal mungkin atau dengan masukan tertentu dapat menghasilkan keluaran semaksimal mungkin (Rambe, 2020). Dalam konteks belanja prioritas pemerintah berupa program padat karya, ukuran efisiensi dilihat dari besaran realisasi anggaran dalam pelaksanaan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja secara maksimal dengan tujuan mengurangi angka pengangguran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber resmi Kementerian Keuangan, BPS, jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, dan informasi dari berita resmi yang telah dirilis di media daring. Penelitian akan melihat efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa belanja prioritas program padat karya dapat berjalan baik dengan sangat efektif dan efisien dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia akibat dari pandemi global Covid-19.

## STUDI LITERATUR

### Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dapat dikatakan sebagai upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dengan jumlah tertentu melalui kegiatan yang aktif dan penuh pemahaman untuk mencapai sekumpulan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya secara tepat waktu (Abdurahmat, 2003 dalam Mangerongkonda et al., 2019). Sedangkan Sondang P. Siagian dalam Adyas & D Anggeraiyantie (2019) menyatakan bahwa melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang sudah dialokasikan dengan tujuan mencapai bermacam-macam sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu adalah pengertian efektivitas. Pendapat yang lain menyatakan bahwa kemampuan dari suatu organisasi atau sejenisnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi (program atau misi kegiatan) tanpa adanya desakan atau bersitegang dalam pelaksanaannya atau

ketercapaian secara baik suatu operasi pada area publik disebut efektivitas (Kurniawan, 2008 dalam Hendrawan, 2016).

Sementara itu, Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu indikator berhasil atau tidaknya tujuan suatu organisasi tercapai. Organisasi tersebut dikatakan berjalan efektif apabila suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengertian berikutnya menurut Dunn (2017) menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Definisi lain dinyatakan oleh Schermerhorn (2003) bahwa efektivitas adalah suatu penilaian pencapaian target *output* (keluaran) dengan cara membandingkan antara *output* anggaran yang biasanya disingkat dengan OA (seharusnya) dengan *output* realisasi yang biasanya disingkat dengan OS (sesungguhnya). Jika nilai OS lebih kecil dari nilai OA, maka pekerjaan tersebut dianggap efektif.

Bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi diartikan dengan menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, atau masukan tertentu untuk mencapai keluaran yang maksimal. Menurut Adisasmita dalam Widiastuti (2015), efisiensi adalah pencapaian *output* dengan menggunakan biaya terendah dan alokasi *input* yang optimal dan baik.

Definisi lain menurut Susilo (2011) menyebutkan bahwa efisien adalah kondisi yang menunjukkan penyelesaian pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan menggunakan kemampuan penuh yang dimiliki dengan benar. Sementara itu, menurut Soekartawi et al. (2002), upaya penggunaan masukan seminimal atau sekecil mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin atau sebesar-besarnya adalah definisi dari efisiensi. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari sisi waktu dan sisi kinerja. Perbandingan dari sisi waktu diukur berdasarkan hasil kerja dibandingkan dengan ukuran waktu yang ada. Perbandingan dari sisi kinerja diukur dari kuantitas dan kualitas hasil kerja karyawan dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dari beberapa pengertian tersebut, efisiensi dapat diartikan sebagai perolehan hasil tertentu yang maksimal dengan menggunakan masukan yang serendah-rendahnya.

### Program Padat Karya

Padat karya diartikan sebagai kegiatan proses pembangunan yang menggunakan modal tenaga manusia lebih banyak bila dibandingkan

dengan penggunaan tenaga mesin. Program padat karya memiliki tujuan utama yaitu membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, diprioritaskan bagi yang mengalami kehilangan pendapatan atau pekerjaan tetap, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan lebih luas untuk penyerapan tenaga kerja yang berasal dari para pengangguran (Prasasti, 2015).

Program padat karya merupakan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 4 Menteri pada tahun 2017, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan (Manembu et al., 2019). Program padat karya (*cash for work*) ditujukan untuk pekerjaan bagi masyarakat seperti pembangunan sanitasi lingkungan, kegiatan penghijauan, dan pembangunan infrastruktur perdesaan, sebagaimana kebutuhan masing-masing daerah. Program padat karya sangat tepat karena banyaknya sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Salah satu wujud pekerjaan program padat karya adalah konstruksi perbaikan jalan, saluran air, dan sebagainya, dengan tujuan mengurangi angka pengangguran.

Efek pandemi Covid-19 yang begitu luar biasa dalam segala aspek kehidupan khususnya aktivitas perekonomian, menjadikan banyak terjadi PHK besar-besaran dan pengurangan jam kerja maupun berkurangnya lapangan pekerjaan baru. Pemerintah melalui belanja prioritas program padat karya berusaha memberikan solusi kepada para pekerja atau pengangguran yang terdampak dengan memperbanyak proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya atau banyak membutuhkan tenaga kerja manusia sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik sebagai bagian dari upaya mendukung Program PEN.

### Tingkat Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) menurut Sukirno (2011) didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja dan ingin memiliki pekerjaan namun pekerjaan tersebut belum mereka dapatkan. BPS (2022) menyampaikan bahwa orang yang menganggur meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan dalam kondisi tidak bekerja, atau sedang menyiapkan suatu kegiatan usaha, atau sedang kondisi putus asa karena merasa susah mendapatkan suatu pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum melaksanakan pekerjaan tersebut.

Sukirno (2011) menyatakan bahwa yang tergolong pengangguran adalah orang yang ingin memperoleh pekerjaan dan termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan. Orang yang tergolong angkatan kerja berada pada usia 15-64 tahun, namun tidak seluruhnya yang berada pada usia tersebut dihitung sebagai angkatan kerja. Sedangkan menurut Samuelson & Nordhaus (2009) penghitungan tingkat pengangguran adalah banyaknya orang yang menganggur dibagi dengan seluruh angkatan kerja.

Sukirno (2011) menyampaikan bahwa jenis-jenis pengangguran menurut para ahli ekonomi meliputi pengangguran struktural, pengangguran siklis, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Krisnandika et al. (2021) menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 dengan adanya kebijakan pemerintah berupa *work from home* (WFH) dan *school from home* (SFH) yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi terhambat karena perusahaan tidak mendapatkan *cashflow*. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan jumlah pengangguran meningkat besar dan jumlah penduduk yang bekerja berkurang drastis.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur *review* digunakan pada penelitian ini melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik dari jurnal ilmiah, peraturan dan ketentuan yang berlaku, media *online* (elektronik berlandaskan *website*), publikasi resmi Kementerian Keuangan terkait realisasi belanja PC-PEN dalam buku yang berjudul "Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020", publikasi BPS, dan juga termasuk laporan berkala dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), yaitu *Weekly Progress Realisasi Belanja PC-PEN 2021*. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha mendapatkan informasi-informasi terkait yang relevan dan valid untuk mendapatkan gambaran atau menjawab permasalahan penelitian yang disajikan sesuai topik dalam tulisan ini.

Teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan bersifat empiris, artinya melalui cara menghimpun informasi-informasi resmi dari pihak terkait yang telah teruji kebenarannya dan juga berasal dari penelitian terdahulu sebagai data pendukung dalam memperkuat analisis pembahasan. Data yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan ketentuan pelaksanaan belanja prioritas program padat karya dan dianalisis dengan menerapkan metode telaah efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program

padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 pada 34 provinsi di Indonesia.

Telaah efektivitas tersebut dilakukan dengan mengukur rata-rata rasio antara jumlah penyerapan tenaga kerja dengan target *output* tenaga kerja yang telah ditetapkan pada program padat karya yang dilaksanakan oleh 4 K/L di tahun 2020 dan 6 K/L di tahun 2021 untuk mengetahui tingkat efektivitas program tersebut. Telaah efisiensi dilakukan dengan mengukur rata-rata rasio antara besaran realisasi penyerapan anggaran belanja prioritas program padat karya dengan pagu DIPA K/L pelaksana program tersebut selama tahun 2020 s.d. 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketercapaian Program Padat Karya Tahun 2020

Dalam upaya menghadapi dan mengatasi pandemi yang melanda banyak negara di dunia, Pemerintah bekerja sangat keras dan secara komprehensif melindungi masyarakat di semua aspek, mulai dari aspek kesehatan, sosial, agama, hingga ekonomi dari dampak yang semakin dalam, yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bernegara terutama perekonomian nasional dengan meluncurkan berbagai ketetapan mulai dari pembatasan mobilisasi masyarakat secara besar-besaran melalui PSBB, pemberlakuan PPKM dengan membatasi kegiatan-kegiatan tertentu, dan juga program pemerintah untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi yang disebut penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Untuk program PC-PEN diawali melalui penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya disahkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020.

Pada tahun 2020, program PC-PEN mendapat alokasi anggaran sekitar USD51,3 miliar atau sebesar Rp695,2 triliun, yang dibagi ke dalam enam kebijakan sektoral, yakni sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor kementerian negara dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda), sektor dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor kebijakan pembiayaan korporasi, dan sektor kebijakan insentif usaha. Selanjutnya diterbitkan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh pemerintah, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dan Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dan Nomor 43 Tahun 2020, hingga beberapa Peraturan Menteri Keuangan, termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang meminta agar pemda dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan

prioritas penggunaannya dalam mengantisipasi dan menangani dampak dari pandemi Covid-19.

Belanja prioritas program padat karya yang dilaksanakan di hampir seluruh daerah Indonesia adalah bagian dari program PC-PEN yang telah dilaksanakan sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini. Program tersebut diintensifkan oleh Pemerintah untuk tetap terus menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian nasional akibat banyaknya pekerja yang terkena PHK dari pemberi kerja baik formal maupun informal. PHK adalah imbas menurunnya aktivitas ekonomi dunia usaha selama pandemi Covid-19, termasuk program padat karya tersebut ditujukan juga untuk para pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan akibat berkurangnya atau tidak adanya lowongan pekerjaan selama pandemi.

Presiden mengarahkan agar program padat karya diperbanyak untuk memperkuat daya beli masyarakat, karena belanja pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD adalah penggerak utama perekonomian masyarakat di saat pandemi Covid-19. Semua K/L juga melaksanakan program padat karya dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan (Kementerian Keuangan, 2021a). Di tahun 2020 program padat karya dilaksanakan oleh 4 K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian.

#### **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Terdapat 16 program padat karya tunai (*cash for work*) dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 638.990 orang, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Perumahan. Ruang lingkup pekerjaan atau kegiatan pokok terkait program padat karya pada Kementerian PUPR antara lain membangun infrastruktur kerakyatan untuk mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti optimalisasi fungsi irigasi kecil, memperbaiki jalan di lingkungan masyarakat, rumah yang dibiayai subsidi, penanganan kawasan yang kumuh, dan upaya meningkatkan kualitas air minum termasuk sanitasi. Program atau kegiatan tersebut dilaksanakan dalam wujud membangun infrastruktur dengan mempekerjakan warga atau masyarakat lokal, khususnya untuk infrastruktur dengan skala kecil atau berupa pekerjaan yang tidak rumit/ sederhana yang dilaksanakan tanpa bantuan teknologi. Selain 16 program tersebut di

atas, terdapat 18 kegiatan pembangunan prasarana atau infrastruktur yang diubah metode pelaksanaannya menjadi padat karya dengan waktu penyelesaian antara 30 sampai 100 hari, seperti pengelolaan bendungan air, danau/telaga, dan bangunan lainnya yang menampung air, pembangunan jalan dan jembatan di beberapa lokasi, dan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian PUPR hingga akhir bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp12,19 triliun (97,67%) dengan alokasi pagu sebesar Rp12,48 triliun.

#### **Kementerian Perhubungan**

Program kerja yang padat karya pada Kemenhub dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM). Lingkup pekerjaan atau kegiatan dalam program tersebut berupa pekerjaan yang tidak membutuhkan spesialisasi keterampilan tertentu, seperti membersihkan saluran air, membersihkan bangunan pelengkap, membersihkan perlengkapan jalan, melakukan pengecatan pada jalan, dan memotong rumput. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian Perhubungan hingga akhir bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp7,11 triliun (89,23%) dengan alokasi pagu sebesar Rp7,97 triliun.

#### **Kementerian Pertanian**

Berbagai jenis pekerjaan yang tergolong program padat karya pada Kementan seperti kegiatan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara massal, kegiatan untuk olah tanah dan percepatan penanaman, kegiatan perkebunan, dan rehabilitasi untuk jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT). Kegiatan lainnya yaitu membangun embung pertanian, melaksanakan optimalisasi lahan rawa, kegiatan membangun irigasi dan juga kegiatan mengantisipasi musibah banjir dan kekeringan, kegiatan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kegiatan untuk menyerap tenaga kerja bidang pertanian serta membina UMKM bidang pertanian. Di samping itu, Ditjen Perkebunan juga menetapkan kegiatan yang bersifat padat karya dengan cara menambahkan biaya hari orang kerja (HOK) untuk seluruh kegiatan Ditjen Perkebunan. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian Pertanian hingga akhir bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp0,98 triliun (80,07%) dengan alokasi pagu sebesar Rp1,22 triliun.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Program Padat Karya Tahun 2020

K/L	Tenaga Kerja (orang)		%
	Target	Realisasi	
Kementerian Pertanian	2.000.000	1.634.814	81,74
Kementerian Perhubungan	27.029	23.592	87,28
Kementerian Kelautan & Perikanan	1.379	15.190	1.101,52
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	595.142	680.221	114,29
Jumlah	2.623.550	2.353.817	89,72

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021), diolah penulis

### Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kegiatan bersifat padat karya pada KKP diselenggarakan oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut yang ditujukan kepada masyarakat sekitar pesisir laut dan pelaku usaha wisata berbasis kelautan (bahari) yang terdampak Covid-19 berupa restorasi pada terumbu karang dengan dibuatnya taman serta kebun dari karang atau sering dikenal dalam sebutan *Indonesian Coral Reef Garden* (ICRG). Kegiatan tersebut ditujukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menjadi produktif melalui pemanfaatan tenaga kerja sekitar dan sumber kemampuan yang dimiliki. Salah satu bagian dari ICRG adalah rehabilitasi terumbu karang bersifat padat tenaga kerja yang dilaksanakan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang di Makassar dan restorasi terumbu karang di Pulau Bali. Program padat tenaga kerja selanjutnya berupa bantuan pada pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) yang dilakukan oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Kegiatan PITAP tersebut berwujud swakelola irigasi berlandaskan peran dan oleh kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina) yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga kegiatan pemeliharaan. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian KKP hingga akhir bulan Desember 2020 mencapai Rp0,57 miliar (3,62%) dengan alokasi pagu sebesar Rp15,73 miliar. Program padat karya di tahun 2020 yang telah terealisasi anggarannya sebesar 93,51% (sekitar Rp20,27 triliun) telah menyerap tenaga kerja dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1.

### Ketercapaian Program Padat Karya Tahun 2021

Di tahun 2021, program padat karya kembali digulirkan oleh pemerintah di hampir seluruh provinsi. Program tersebut kembali dilaksanakan tidak hanya oleh empat K/L saja, tapi oleh enam K/L yaitu Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian KKP, Kementan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

### Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program padat karya pada Kementerian PUPR dilaksanakan oleh 377 satuan kerja lingkup Kementerian PUPR melalui berbagai program yaitu pemanfaatan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), kota tanpa kumuh (KOTAKU), revitalisasi drainase, pemeliharaan jalan/jembatan, operasi pemeliharaan irigasi atau rawa, operasi pemeliharaan air tanah atau air baku, dan rumah swadaya. Dalam pelaksanaan program tersebut mengalami beberapa kendala, yaitu pengadaan lahan yang disebabkan kendala pembebasan lahan, ketidaksepakatan harga tanah, dan adanya penyesuaian program/kegiatan serta *output*. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian PUPR tahun 2021 adalah sebesar Rp21,07 triliun (87,58%) dari pagu sebesar Rp24,06 triliun.

### Kementerian Perhubungan

Program padat karya pada Kemenhub dilakukan melalui pemanfaatan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung pada kereta api/pelabuhan/transportasi, jalan, dan pemeliharaan fasilitas sisi udara serta pembangunan/pemeliharaan pada gedung kantor. Dalam pelaksanaannya, kegiatan program tersebut mengalami beberapa kendala, seperti *progress tagging* sebagian besar sudah sesuai dengan pagu anggaran masing-masing subsektor, namun perlu dilakukan *crosscheck* ulang terkait pengecekan jumlah kegiatan, jumlah upah, serta tenaga kerja untuk menghindari terjadinya perubahan data. Selain itu, beberapa kegiatan masih dalam proses lelang dan persiapan kegiatan sehingga program padat karya belum dapat dimulai, dan untuk sektor perhubungan laut ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena masih menunggu persetujuan anggota DPR/DPRD. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kemenhub tahun 2021 adalah sebesar Rp6,29 triliun (91,61%) dari pagu sebesar Rp6,87 triliun.

### Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Program padat karya pada Kementerian ESDM yang dimulai tahun ini dilaksanakan oleh satuan kerja Ditjen Minyak dan Gas Bumi. Realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian ESDM tahun 2021 adalah sebesar Rp1,06 triliun (99,00%) dari pagu sebesar Rp1,07 triliun.

#### Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian LHK melaksanakan kegiatan program padat karya dalam bentuk penanaman mangrove seluas 85,5 hektar yang dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu adanya PPKM yang menjadikan kegiatan penanaman, pembibitan, pelatihan oleh kelompok masyarakat menjadi terhambat, rehabilitasi mangrove dilaksanakan jauh dari pemukiman warga sehingga kesulitan dalam mencari tenaga kerja,

dan beberapa daerah mengalami ombak besar sehingga kegiatan penanaman menjadi tidak optimal. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementerian LHK tahun 2021 adalah sebesar Rp0,54 triliun (35,76%) dari pagu sebesar Rp1,52 triliun.

#### Kementerian Pertanian

Program padat karya pada Kementan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu di bidang infrastruktur pertanian yang meliputi pengembangan jaringan irigasi tersier (JIT), perpompaan, perpipaan, embung pertanian, optimasi lahan, lahan konservasi dan rehabilitasi serta padat karya percontohan. Terdapat juga beberapa kegiatan di bidang dukungan peningkatan produksi pertanian. Kendala dari pelaksanaan kegiatan yaitu adanya perubahan petunjuk teknis dalam penetapan calon petani calon lokasi (CPCL) berdasarkan rekomendasi

Tabel 2 Target dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Program Padat Karya Tahun 2021

K/L	Tenaga Kerja (orang)		%
	Target	Realisasi	
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	1.290.000	1.587.583	123,07
Kementerian Perhubungan	42.217	62.947	149,10
Kementerian Pertanian	583.600	580.211	99,42
Kementerian Kelautan & Perikanan	6.212	4.368	70,32
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.060	7.350	145,26
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.797	17.222	28,33
Jumlah	1.987.886	2.259.681	113,67

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021), diolah penulis

Tabel 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Padat Karya Tahun 2021 (dalam miliar rupiah)

K/L	Pagu (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2020	2021	2020	2021
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	12.476,71	24.063,58	12.186,27 (97,67%)	21.076,06 (87,58%)
Kementerian Perhubungan	7.966,76	6.869,51	7.108,68 (89,23%)	6.293,32 (91,61%)
Kementerian Pertanian	1.219,11	1.775,70	976,16 (80,07%)	1.718,21 (96,76%)
Kementerian Kelautan & Perikanan	15,73	155,11	0,57 (3,62%)	148,93 (96,02%)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1.073,24	-	1.062,48 (99,00%)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.523,49	-	544,82 (35,76%)

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021), diolah penulis

Tabel 4 Persentase Rasio Efisiensi Program Padat Karya Tahun 2020 s.d. 2021

K/L	Tahun (%)		%
	2020	2021	
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	97,67	87,58	92,63
Kementerian Perhubungan	89,23	91,61	90,42
Kementerian Pertanian	80,07	96,76	88,42
Kementerian Kelautan & Perikanan	3,62	96,02	49,82
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	99,00	99,00
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	35,76	35,76
Rata-rata Efisiensi	93,51	86,98	90,25

Sumber: diolah penulis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga pelaksanaan dan penyaluran anggaran menjadi tertunda. Selain itu, adanya penundaan kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa di beberapa kegiatan seperti swakelola pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, perpipaan, perpompaan, dan olah tanah/tanak. Adapun realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada Kementan tahun 2021 adalah sebesar Rp1,72 triliun (96,76%) dari pagu sebesar Rp1,77 triliun.

### Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada kementerian ini, program padat karya dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan berbagai kegiatan berupa pemanfaatan saluran air (Irigasi) untuk perikanan tambak/kolam yang disebut PITAP, mina padi (pemeliharaan ikan di sawah), pemberian bantuan keramba jaring apung (KJA) untuk budidaya laut, kluster pada kawasan tambak udang, *milenial shrimp farming* (MSF), rehabilitasi pada kawasan hutan mangrove, pengembangan pada usaha pengrajin garam rakyat (PUGAR), dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada tata niaga garam rakyat. Kendala yang dihadapi dari kegiatan tersebut yaitu banyaknya para petugas yang terdampak atau terkena covid-19 sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, adanya pengurangan pagu anggaran akibat *refocusing* anggaran. Kegiatan reguler mangrove telah selesai dan tidak ada kendala anggaran belanja tambahan (ABT) mangrove, namun kegiatan tersebut terkendala PPKM dan *refocusing* anggaran untuk dilanjutkan kembali. Sementara itu, kegiatan integrasi lahan garam masih terkendala cuaca. Realisasi anggaran untuk terlaksananya program padat karya pada KKP tahun 2021 adalah sebesar Rp0,15 triliun (96,01%) dari pagu sebesar Rp0,16 triliun. Dengan realisasi anggaran program padat karya per 31 Desember 2021 sebesar Rp30,84 triliun (86,98%), maka tercapai realisasi penyerapan tenaga kerja sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.

### Pembahasan

Pelaksanaan program padat karya telah terealisasi dengan baik sejak tahun 2020 untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa

pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2021 dengan penyerapan anggaran APBN sebagaimana pada Tabel 3. Jika dihitung secara rasio persentase realisasi anggaran pelaksanaan program padat karya dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2021, maka dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pelaksanaan program padat karya kurang efisien sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Berdasarkan data dalam Tabel 4 tersebut, diketahui bahwa program padat karya yang paling efisien dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena realisasi penyerapan anggaran paling sedikit dan mengingat tidak ada ukuran pembanding dengan tahun 2020. Selanjutnya rata-rata realisasi program padat karya yang efisien tahun 2020 s.d. 2021 berikutnya adalah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 49,82% karena realisasi penyerapan anggaran program padat karya paling sedikit di tahun 2020.

Dalam pelaksanaan program padat karya selama tahun 2020 s.d. 2021 juga dapat dilakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan kegiatannya berdasarkan standar ukuran efektivitas sesuai acuan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri (Litbang Depdagri) pada tahun 1991 (Yuniastari & Wiyati, 2015) sebagaimana Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Tingkat Efektivitas	Status Capaian
Di bawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Di atas 80	Sangat Efektif

Sumber: Yuniastari & Wiyati (2015)

Berdasarkan acuan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa program padat karya sangat efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6. Berdasarkan data pada Tabel 6 tersebut, program padat karya yang sangat efektif dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rata-rata efektivitas sebesar 585,92%, meskipun pelaksanaannya lebih efektif di tahun 2020. Secara

Tabel 6 Persentase Rasio Efektivitas Program Padat Karya Tahun 2020 s.d. 2021

K/L	Tahun (%)		%
	2020	2021	
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	114,30	123,07	118,69
Kementerian Perhubungan	87,28	149,10	118,19
Kementerian Pertanian	81,74	99,42	90,58
Kementerian Kelautan & Perikanan	1.101,52	70,32	585,92
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	145,26	145,26
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	28,33	28,33
Rata-rata Efektivitas	89,72	113,67	101,70

Sumber: diolah penulis

keseluruhan, dapat dikatakan rata-rata efektivitas program padat karya yang dilaksanakan oleh enam K/L sangat efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan rasio efektivitas sebesar 101,70%.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian berdasarkan analisis pada *literature review*, berita, serta beberapa referensi terkait pelaksanaan program padat karya selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan bahwa program padat karya yang dilaksanakan oleh beberapa K/L sepanjang tahun 2020 s.d. 2021 mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Secara umum realisasi APBN melalui DIPA Kementerian Negara/Lembaga pelaksana kegiatan program padat karya, dengan total pagu seluruhnya sebesar Rp57,14 triliun dan total realisasi anggaran sebesar Rp51,12 triliun (89,46%), dapat dikatakan pelaksanaan program padat karya di masa pandemi kurang efisien untuk mewujudkan tujuan program tersebut dan dengan total target *output* penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.611.436 orang dan realisasi *output* jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.613.498 orang (100,04%), maka program padat karya selama tahun 2020 s.d. 2021 tersebut sangat efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Pemerintah Pusat sebagai regulator dan Kementerian Negara/Lembaga sebagai operator atau pelaksana kegiatan program padat karya untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk keberlanjutan program padat karya di tahun-tahun berikutnya baik dalam kondisi pandemi Covid-19/non Covid-19 maupun kondisi kehidupan normal. Pelaksanaan kegiatan program padat karya sebaiknya dilakukan segera sejak awal tahun setelah diterimanya DIPA K/L dan target penyerapan tenaga kerja harus lebih besar dari tahun sebelumnya meskipun grafik kasus orang yang positif Covid-19 terus melandai (berkurang), karena angka pengangguran masih tinggi di beberapa wilayah atau daerah yang terdampak pandemi Covid-19 serta pelaksanaan program padat karya juga sebaiknya diperluas pada lebih banyak K/L yang memiliki kegiatan tidak hanya padat modal namun juga padat karya, sehingga tujuan dari pelaksanaan program padat karya dalam mengurangi angka pengangguran dapat lebih efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan program padat karya tunai dari dana desa yang telah mampu mengurangi angka pengangguran di pedesaan seperti diungkapkan pada hasil penelitian terdahulu. Sofi

(2020) menyatakan bahwa pelaksanaan PKT dana desa memberikan manfaat kepada masyarakat miskin dengan minimal 55% tenaga kerja yang terserap dalam setiap kegiatan. Herdiyana (2019) menyampaikan program PKT dana desa memberikan dampak ekonomi secara langsung yaitu upah/gaji yang diterima langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kurnia & Widhiasthini (2021) juga menyatakan bahwa pelaksanaan PKT mampu memberdayakan kelompok marginal, yaitu kelompok keluarga miskin, penganggur, dan setengah penganggur. Hal tersebut senada dengan pendapat Purnomoratih (2021) bahwa program PKT dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menahan laju pertumbuhan angka pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan.

## KETERBATASAN

Penelitian ini berdasarkan analisis atas studi literatur yang terbatas hanya melihat efektivitas program padat karya dari satu indikator, yaitu tingkat pengangguran. Arsip data yang telah terkumpul hanya tersedia dan terbatas pada beberapa informasi atau laporan berkala yang valid dan berita pada media resmi yang saling berkaitan. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan melalui survei atau wawancara secara langsung kepada objek penelitian, yaitu penyelenggara kegiatan program padat karya dan para tenaga kerja, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam dalam membantu representasi data yang lebih baik.

Selain itu, penelitian ini belum mengkaji bagaimana indikator lain yang relevan berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran, seperti program Kartu Prakerja, insentif perpajakan bagi pelaku usaha, dan restrukturisasi pinjaman atau kredit modal bagi UMKM, termasuk peluang penelitian dengan lokus spasial per wilayah yang memiliki jumlah pengangguran paling tinggi dan paling terdampak pandemi Covid-19, serta apakah para pekerja yang ikut program padat karya tersebut benar-benar pengangguran yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, atau tenaga kerja yang sebelumnya telah selesai melaksanakan atau mengikuti program padat karya dari K/L lainnya di masa pandemi Covid-19, sehingga terbuka peluang bagi penelitian baru.

## REFERENSI

Adyas, D., & D Anggeraiyantje, L. (2019). Pengaruh sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) terhadap efektivitas kerja pegawai pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor. *JRB-Jurnal*

- Riset Bisnis*, 1(2), 107–117.  
<https://doi.org/10.35592/jrb.v1i2.247>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita resmi statistik tahun 2020*.  
<https://www.bps.go.id/brs.html/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita resmi statistik tahun 2021*.  
<https://www.bps.go.id/brs.html/>
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen*.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pengangguran*.  
[https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/v\\_ariabel/945](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/v_ariabel/945)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). *Weekly Progres Realisasi Belanja PC-PEN Per 31 Desember 2021*. Jakarta.
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendrawan, M. A. (2016). Efektivitas media center dalam memberikan penanganan keluhan di dinas komunikasi dan informatika kota surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 283–292.
- Herdiyana, D. (2019). Implementasi padat karya tunai dalam menurunkan penduduk miskin di pedesaan Provinsi Lampung dan Riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 16(02), 175–187.  
<https://doi.org/10.25134/equi.v16i02.2193>
- Kementerian Keuangan. (2020). *UU Nomor 2 tahun 2020 bukti negara hadir berikan perlindungan terhadap dampak covid-19*. Retrieved March 1, 2022 from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Menkeu optimis perekonomian Indonesia kuartal III 2021 tumbuh 4,5 persen*. Retrieved March 1, 2022 from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-optimis-perekonomian-indonesia-kuartal-iii-2021-tumbuh-4-5-persen/>
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Presiden minta pemda perbanyak program padat karya untuk tingkatkan daya beli dan konsumsi*. Retrieved June 2, 2022 from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-minta-pemda-perbanyak-program-padat-karya-untuk-tingkatkan-daya-beli-dan-konsumsi/>
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap pengangguran di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3), 638–648.  
<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227>
- Kurnia, U. E., & Widhiasthini, N. W. (2021). Evaluasi kebijakan padat karya tunai pada pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 148–161.  
<http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.148-161>
- Manembu, R. R., Kusen, A. W. S., & Deeng, D. (2019). Padat karya sebagai kontribusi kehidupan masyarakat pada penggunaan dana desa (studi kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan). *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 12(2), 1-21.
- Mangerongkonda, Y., Rompas, W. Y., & Mambo, R. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 5(74), 1–7.
- Mardiasmo, D. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Macroeconomics 19e*. New York: McGraw-Hill Higher Education, Maidenhead.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease*

- 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
- Prasasti, R. (2015). *Program padat karya, serap tenaga kerja*. Retrieved June 2, 2022 from <https://www.indonesiabaik.id/infografis/program-padat-karya-serap-tenaga-kerja>
- Purnomoratih, Y. (2021). Efektivitas program pemulihan ekonomi nasional dalam menopang tingkat kesejahteraan masyarakat kalimantan selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.366>
- Rambe, R. A. (2020). Inefisiensi belanja pemerintah daerah di Indonesia: Pendekatan DEA dan regresi logit. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 311–324. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.175>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi covid-19. *Aicoms: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, 1, p 1–12.
- Yuniastari, N. L. A. K., & Wiyati, R. K. (2015). Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi sistem eresearch STIKOM Bali. *Konferensi Nasional Sistem & Informatika*, 562-568.
- Schermerhorn, J. R. (2003). *Manajemen: Buku 1 edisi bahasa Indonesia manajemen 5e*. Yogyakarta: Andi.
- Soekartawi, A., Dillon, J. L., & Hardaker, J. B. (2002). *Prinsip dasar ekonomi pertanian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sofi, I. (2020). Implementasi padat karya tunai dana desa untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 25–35.
- Sukirno, S. (2011). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susilo, M. (2011). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Widiastuti, A. (2015). *Studi tentang penerapan total quality management (TQM) dalam kaitannya dengan efisiensi biaya produksi pada UKM di Cibaduyut* [unpublished theses]. Universitas Islam Bandung.